

Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDIP Pada Pilkada, Kabupaten Sleman

<http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2011.0004>

Helmi Mahadi

Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Gayo Lues, NAD. *Email:*

helmi_plod@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research will explain on candidate recruitment of major in Sleman that conducted by PDI-P and their behavior. This research uses a case study method through in-depth interviews and written documentation. The result shows that the failure of PDI-P Sleman in carrying internal candidate from the party is due to the occurrence of political pragmatism. In this context, pragmatism comes from two things. Firstly, internal factor is the failure of the PDI-P cadre of Sleman and the phenomenon of money as a determinant of recruitment of candidates. Secondly, external factor is the political culture of society that do not directly influence through elite perceptions about public preferences.

Keywords: Political recruitment, party's pragmatism, and society's pragmatism.

ABSTRAK

Penelitian ini akan menjelaskan tentang proses rekrutmen kandidat bupati Sleman yang dilakukan oleh PDI-P beserta bagaimana perilaku partai yang selalu mendominasi di kursi legislatif Sleman ini. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus melalui wawancara mendalam dan dokumentasi tertulis. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kegagalan PDI-P dalam mengusung kandidat dari internal partai adalah karena terjadinya pragmatisme politik. Dalam konteks ini, pragmatisme bersumber dari dua hal. Pertama, faktor internal, yaitu kegagalan kaderisasi PDI-P Sleman dan fenomena uang sebagai penentu perekrutan kandidat. Kedua, faktor eksternal, yaitu budaya politik masyarakat yang berpengaruh tidak secara langsung melalui persepsi elit terhadap kecenderungan pilihan publik.

Kata kunci: Rekrutmen politik, pragmatisme partai dan pragmatisme masyarakat.

PENDAHULUAN

Partai politik berfungsi sebagai saluran aspirasi warga negara. Peran partai politik memperoleh momentumnya pada saat Pemilu, ketika warga negara memilih para anggota legislatif yang akan membawa aspirasi mereka. Karena itu, partai politik memiliki tugas, yaitu menyeleksi, menawarkan, dan mencalonkan kadernya sebagai calon anggota legislatif untuk dipilih rakyat. Partai yang menjadi pemenang pemilu di suatu daerah, bisa dimaknai sebagai partai yang memperoleh tempat di hati masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka. Dalam kerangka itu, ada fenomena menarik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Partai pemenang pemilu legislatif, seringkali tidak mencalonkan kadernya sendiri dalam Pilkada. Besarnya basis massa dan konstituen yang dimiliki partai pemenang pemilu, tidak menjadikannya “percaya diri” untuk maju sendiri (dan dengan kadernya sendiri) dalam Pilkada.

Hal ini sering terjadi, partai pemenang ini berkoalisi dengan partai-partai lain, dan mencalonkan kandidat yang berasal dari luar partai. Langkah yang ditempuh oleh partai-partai politik ini pun bukan tanpa alasan. Hal ini karena partai politik yang menang pemilu tidak otomatis berjaya dalam pilkada. Menurut catatan LSI (2005), sebagian besar (72,3%) Pilkada dimenangkan oleh partai atau koalisi partai yang bukan pemenang pemilu legislatif. Dalam *Sinar Harapan* (5 Mei 2008; 5) salah satu yang cukup fenomenal adalah kemenangan PKS dalam Pilkada Jawa Barat. PKS yang merupakan urutan kelima, berhasil memenangi pertarungan karena mengusung non-kader.

Berdasarkan hasil penelitian P2P-LIPI, Ikrar Nusa Bhakti dalam *Kompas* (31 Mei 2011; 2) mengungkapkan, bahwa dari 150 calon yang diusul pasangan calon kepala daerah, PDI-P hanya menetapkan sekitar seperlima yang merupakan kadernya sendiri yang diajukan dalam Pilkada 2009. Sisanya adalah non-kader. Sebaliknya, Partai Golkar yang menang di banyak daerah dalam pemilu legislatif, mengalami kekalahan mutlak dalam Pilkada selama 2009-2010. Dalam *Jakarta Press* (6 April 2011: 7), Partai Golkar mengakui bahwa salah satu faktor kekalahan ini adalah karena mereka mengusung kader sendiri. Akibatnya, mereka membuka lebih lebar lagi peluang non-kader untuk ikut serta dalam kandidasi.

Ada beberapa hal yang mungkin bisa menjelaskan fenomena di atas.

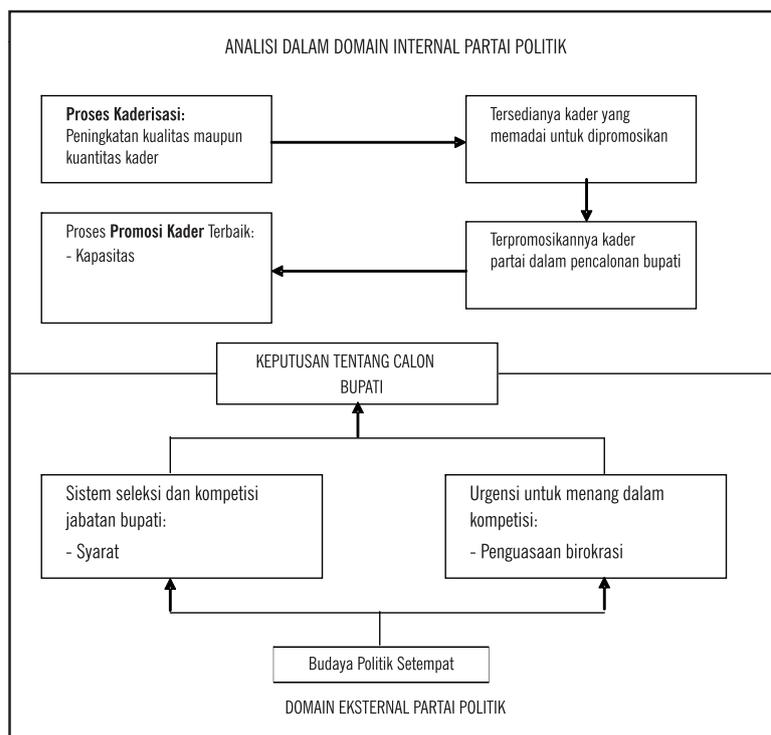
Pertama, berbeda dengan pemilu legislatif yang berbasis partai politik, pilkada adalah berbasis individu kandidat. Dengan demikian, ketokohan seorang figur kandidat akan sangat menentukan tingkat keterpilihannya. Karena itu, sosok *incumbent* menjadi rebutan partai-partai pemenang untuk mencalonkannya kembali. Selain karena sosok *incumbent* sudah sangat populer, kedudukannya sebagai pejabat diduga bisa dimanfaatkan untuk memobilisasi dana maupun dukungan dari masyarakat. *Kedua*, faktor popularitas saja belum cukup untuk memenangi pilkada. Faktor modal finansial juga sangat menentukan dalam pilkada. Hal ini berarti, bahwa partai yang besar ataupun kandidat yang terkenal, harus didukung pula oleh dana yang memadai. Para kandidat membutuhkan biaya yang cukup besar untuk bisa meraih simpati massa sekaligus memobilisasi para pemilih tersebut.

Kajian studi ini melihat, bahwa hampir semua partai pemenang Pemilu 2009 di Sleman, terutama PDI-P dan Partai Demokrat yang cukup kursi tidak mencalonkan kadernya di Pilkada 2010. Studi ini akan menjelaskan mengapa partai politik cenderung berperilaku pragmatis, yakni tidak mencalonkan kadernya sendiri melainkan mencari aktor lain yang mempunyai elektabilitas lebih tinggi. Pada akhirnya, fokus utama studi ini melihat mengapa PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu 2009 tidak mencalonkan kadernya dalam Pilkada 2010 di Sleman? Karena itu, apa alasan PDI-P tidak mencalonkan kadernya?

KERANGKA TEORITIK

Pada umumnya, perilaku masyarakat masih tradisional dan pragmatis dalam memandang politik. Akibatnya, sikap apatis menggejala dalam pemilu. Sikap apatis pemilih menyebabkan mereka secara instan dan irrasional memilih kandidat yang menguntungkan mereka, khususnya memberi uang maupun dalam bentuk bungkusan stimulan; bantuan amal, dan bantuan pembangunan desa yang berupa material. Yang terjadi kemudian adalah politik transaksional. Pemilih menjatuhkan pilihannya berdasarkan logika-logika sederhana dan bersifat jangka pendek. Dalam budaya politik ini, pemilih terlibat dalam aktivitas pemilu dengan cara harus diberi kompensasi uang maupun barang. Hal ini menyebabkan biaya pemilu menjadi mahal.

Dengan demikian, studi ini pada dasarnya adalah tentang perilaku partai di tingkat lokal, lebih khusus lagi PDI-P. Studi ini memotret perilaku partai dalam melangsungkan proses rekrutmen politik. Untuk mempersiapkan kandidat tersebut, partai politik menciptakan mekanisme rekrutmen untuk memastikan terjaringnya kandidat yang tepat. Dengan demikian, partai politik mempunyai sistem seleksi dan persyaratan untuk menjaring orang luar menjadi kandidat. Selain itu, partai politik mengembangkan kadernya untuk dinominasikan dalam pemilihan. Dalam kerangka itu, keputusan partai akan dilacak dari dua domain secara simultan, yakni domain internal dan domain eksternal. Keduanya diasumsikan memiliki peran yang sama pentingnya dalam mendiktekan pilihan. Hal ini diperagakan dalam gambar dibawah ini:



Sumber: Data primer, 2010

GAMBAR ALUR ANALISIS SELEKSI CALON KEPALA DAERAH

1. Melacak Alasan Pencalonan: Analisis Internal

Analisis internal didedikasikan untuk melihat bagaimana partai membangun mekanisme kaderisasi, mekanisme promosi kader-kader terbaiknya untuk mengisi jabatan publik. Dengan telaah ini, kita bisa menilai siap tidaknya PDI-P untuk mempromosikan kader-kader

terbaiknya untuk berkompetisi dalam menduduki jabatan kepala daerah. Analisis internal ini akan melacak apa yang terjadi dalam partai, dalam hal ini PDI-P Sleman, yang berujung pada terpilihnya seseorang menjadi kandidat kepala daerah. Adapun langkah-langkah analisis yang akan dilakukan adalah: (a) memetakan standar nilai normatif dalam partai politik; (b) analisis terhadap proses kaderisasi dalam partai; dan (c) proses promosi kader terbaik. Tiga analisis ini akan dijabarkan sebagai berikut.

a. Standar Nilai Normatif dalam Partai Politik

Standar nilai normatif dalam partai politik mengacu pada semua kerja partai dalam mengambil keputusan politik yang berbasiskan pada AD/ART partai. Partai politik merumuskannya sebagai platform partai, yang bertujuan mempromosikan kader partai untuk mengisi jabatan di struktur partai, lembaga legislatif, dan lembaga eksekutif. Dalam rangka itu, mekanisme rekrutmen politik dalam rute-rute kaderisasi menjadi tahapan penting yang konsisten disepakati dalam partai politik (Erawan, 2005). Pada akhirnya, baik dan buruk suatu keputusan partai politik dalam membuat kebijakan partai adalah dilihat dari nilai standar normatif tersebut. Dalam pengertian, apa yang ditulis dan dipidatokan dalam ajaran-ajaran partai itulah yang dilakukan. Dengan begitu, nilai standar normatif menjadi cerminan perilaku politik di segala arena politik (Norris, 2006).

Inilah tolok ukur suatu partai politik disebut pragmatis atau tidak. Secara definisi, disebut pragmatis jika partai mengutamakan kepentingan jangka pendek dengan mengesampingkan nilai normatif partai. Partai yang pragmatis akan menghilangkan peran ideologi partai dalam setiap tindakannya. Suatu keputusan partai tidak lagi berlandaskan *standing point* ideologi, melainkan mempertimbangkan logika untung rugi (Imawan, 2004: 15). Dengan kata lain, partai yang pragmatis jika partai mengutamakan kepentingan cara praktis atau hasil lebih penting ketimbang hal yang lain—yang penting menang. Adapun dalam pilkada, hasil akhir ini berarti kemenangan politik untuk jabatan kepala daerah. Kemenangan politik tersebut dicapai dengan cara mendapatkan suara terbanyak. Di sinilah pragmatisme muncul jika tujuan itu (hasil akhir/kemenangan) dicapai dengan mengabaikan cara-cara yang telah disepakati dalam platform partai.

b. *Proses Kaderisasi dalam Partai*

Secara normatif, kaderisasi adalah proses bahwa rekrutmen dalam partai politik akan menghasilkan orang-orang baru yang kompeten dan menjamin sirkulasi elit partai. Sesuai peran partai politik untuk berkiprah dalam politik dan pemerintahan, pada tahap selanjutnya, kader-kader akan diarahkan untuk menjadi kandidat guna mengisi jabatan publik (Pamungkas, 2009). Sumber kader diperoleh melalui beberapa cara. *Pertama*, dari partai politik melalui pendidikan dasar politik dan even-even, seperti pentas kesenian, kerja bakti untuk bencana alam dan diskusi kelompok. *Kedua*, dari organisasi sayap yang sengaja dibentuk untuk menjaring calon kader maupun ormas sebagai *onderbow* partai, terutama dari generasi muda yang potensial. *Ketiga*, dari organisasi mahasiswa ataupun organisasi masyarakat yang seideologi dengan partai (Hamid, 2008; 14).

Secara teoritis, partai politik mencalonkan non-kader sebagai kandidat jabatan publik adalah menunjukkan macetnya proses kaderisasi ini, terutama di tingkat lokal. Ada beberapa sebab macetnya kaderisasi ini. *Pertama*, kurangnya kuantitas dan kualitas kader yang masuk ke dalam partai. *Kedua*, kader-kader yang masuk ke partai tidak mempunyai kapabilitas sebagai politisi. Mereka masuk ke partai cenderung sebagai simpatisan, tanpa latarbelakang yang memadai untuk berkiprah dalam politik maupun pemerintahan. *Ketiga*, mekanisme penjenjangan kaderisasi yang berlangsung dalam partai cenderung tidak transparan. Disinyalir, penempatan person pada pos-pos tertentu dalam partai bukan berdasar kapabilitas dan keahlian, namun pada kedekatan dengan elit maupun kemampuan untuk menyumbang dana. Akibatnya, kader-kader yang mempunyai kemampuan namun minim dana, tidak bisa meniti jenjang karir secara mulus.

Beberapa sebab diatas membuat partai-partai pemenang pemilu mengalami krisis ketersediaan kader handal. Ketika dihadapkan pada momentum Pilkada, mau tidak mau partai harus bersikap pragmatis dengan mengambil kandidat yang berasal dari luar partai. Alasannya, aktor tersebut mempunyai elektabilitas tinggi, ataupun kemampuan dana yang memadai.

c. *Proses Promosi Kader Terbaik*

Proses promosi kader adalah memproyeksikan kader partai agar bisa mengisi jabatan eksekutif sesuai dengan kapasitasnya dan elektabilitasnya. Kapasitas seorang kader dinilai dari kemampuannya sebagai politisi maupun birokrat. Partai politik yang mempunyai banyak kader handal dan memadai dalam jumlah mencukupi, tidak akan kesulitan dalam mempromosikan kader tertentu untuk jabatan publik, yang terpenting di sini adalah aturan main untuk menentukan fase-fase yang harus dilalui seorang kader agar memenuhi syarat untuk dipromosikan. Jadi, proses promosi bukan berdasar pertemanan dengan elit partai, ataupun seberapa besar modal yang dimiliki. Adapun elektabilitas seorang kader yang akan dipromosikan, diukur dari tingkat penerimaan dan pengakaran di basis massa maupun masyarakat secara umum (Erawan, 2005).

2. Budaya Politik dalam Masyarakat: Analisis Eksternal

Analisis eksternal dilakukan untuk melihat situasi dan kondisi yang melatarbelakangi penentuan keputusan, tepatnya dalam penentuan calon. Analisis akan memotret kultur dan perilaku politik masyarakat, yang kemudian mengejawantah sebagai aspirasi masyarakat. Kultur masyarakat ini adalah hal yang penting, sebagai kancah bagi partai-partai politik untuk mendekati konstituennya, sekaligus memobilisasi suara untuk kemenangan. Adapun langkah-langkah analisis yang akan dilakukan adalah: (a) menganalisis akar pragmatisme dalam masyarakat; (b) mengurai sistem seleksi dan kompetisi untuk jabatan bupati; dan (c) faktor-faktor apa saja yang penting dalam keputusan calon bupati dan wakil bupati.

Argumentasi dari analisis diatas akan mengidentifikasi ciri-ciri pragmatis dalam pencalonan kandidat untuk mengisi jabatan kepala daerah. Analisis akan dimulai dari akar pragmatisme yang ada dalam budaya politik masyarakat, yang mencerminkan perilaku politik yang berbasis pragmatis. Untuk menampakkannya itu, secara teoritis akan digambarkan apa saja watak pragmatis masyarakat dan bagaimana tindakan pragmatis itu dalam mencakupi perpolitikan.

a. *Akar Pragmatisme dalam Masyarakat*

Pragmatisme dalam masyarakat mempunyai dua sisi. Di satu sisi mempunyai dimensi positif, yakni mengutamakan cara-cara praktis dan

konkret untuk memecahkan masalah. Namun di sisi lain, pragmatisme menjadi negatif ketika disusupi politik uang (Marijan, 2006). Berkaitan pilkada, sikap pragmatis merupakan suatu gejala yang sebetulnya positif, kalau pragmatisme itu diartikan mencari peluang yang paling besar untuk memenangkan calon. Watak pragmatisme menjadi negatif jika proses-proses kaderisasi dan perekrutan kandidat dipengaruhi uang untuk memenangkan kandidat atau untuk keperluan dana partai.

Akar pragmatisme dalam masyarakat bisa dilacak dari kultur politik yang mencerminkan perilaku politik masyarakat. Pragmatisme muncul dalam masyarakat plural, yakni keanekaragaman yang jamak terjadi di Indonesia yang ber-bhinneka tunggal ika. Dalam masyarakat yang plural inilah pragmatisme tumbuh berkembang, sebab dalam masyarakat seperti ini, idealisme yang kolot atau terjerumus dalam perdebatan hanya akan menghambat tercapainya komitmen dan kepentingan umum. Semangat pragmatisme adalah bahwa kebenaran itu relatif, sesuai dengan konteks waktu, tempat, budaya, dan seterusnya.

Indikator pragmatisme tersedia pada menyebarkan luasnya semangat modernisme yang ditopang oleh arus globalisasi, menjadikan masyarakat lebih bergantung pada cara-cara praktis dan konkret untuk memecahkan masalah atau memajukan diri. Semangat seperti ini khususnya mengemuka di kalangan generasi muda, yang cenderung "cair" nir-ideologi, dan lebih mementingkan hasil dibanding proses. Sikap pragmatis bukan menjadi sesuatu yang tabu, sebab bukan semata menghalalkan segala cara guna mencapai hasil secepat-cepatnya, melainkan lebih sebagai piawai dalam pelaksanaan, bukan melulu berkubang dalam konsep (Baert and Turner, 2007).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tingkah laku politik merupakan pencerminan dari budaya politik suatu masyarakat yang penuh dengan aneka bentuk karakter dan aneka bentuk kelompok dengan berbagai tingkah lakunya. Perilaku politik tidak ditentukan oleh situasi temporer, tetapi mempunyai pola yang berorientasi pada pola umum (*common orientation*) yang tampak secara jelas sebagai pencerminan budaya politik yang seringkali disebut peradaban politik. Dengan demikian, perilaku politik tumbuh atas kesadaran yang mendalam tentang sistem politik yang berlangsung atau ideologi dalam suatu negara (Almond, 1995: 56).

Seorang pragmatis tidak akan peduli kubu politik mana yang menang, dan hanya peduli pada seberapa baik kebijakan telah berjalan. Pragmatisme politik adalah ciri khas kultur politik dalam masyarakat yang berprinsip 'yang penting sesuatu/program berfungsi, tak peduli caranya.' Singkat kata, pragmatisme adalah penolakan terhadap teori dan ideologi, dan lebih memilih fakta dan realitas yang telah teruji. Namun, sisi negatif pragmatisme ketika masyarakat berhadapan persoalan ekonomi. Masyarakat pragmatis akan mudah dipengaruhi oleh politik uang berbentuk bantuan dalam bungkus stimulan pembangunan masyarakat.

Kultur pragmatis masyarakat ini mempengaruhi perilaku partai tidak secara langsung, tetapi melalui persepsi elit terhadap kecenderungan pilihan publik. Dengan demikian, atas dasar pertimbangan apa persepsi elit bahwa sosok kandidat yang terekrut dapat terpilih oleh publik? Harapan elit partai dapat menjadi kenyataan ketika proses seleksi kandidat yang merupakan persepsi elit sesuai dengan kenyataan dan keinginan publik (Marijan, 2006). Dalam memutuskan orang mana yang layak untuk direkrut sebagai kandidat pilkada, elit partai mempunyai persepsi yang diukur berdasar tiga hal yaitu, modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi.

Ketiga modal sosial diatas adalah persepsi elit di partai yang dapat diukur dari sosok yang mudah diterima masyarakat. Ketiga modal itu bisa berdiri sendiri sendiri tanpa ada kaitan satu sama lainnya. Tetapi, seringkali ketiganya berkaitan antara satu dengan lainnya. Artinya, pasangan calon kepala daerah itu memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal. Dengan demikian, persepsi elit dalam keputusan pencalonan kandidat sejak awal tahapan di partai dan pemilih menjadi standar persepsi elit yang diperoleh kandidat di luar maupun di dalam partai.

b. Sistem Seleksi dan Kompetisi Kandidat

Sistem seleksi dan kompetisi untuk jabatan bupati dan wakil bupati merupakan suatu mekanisme partai dalam menentukan kandidat partai yang berbasis elektoral. Dalam rangka ini, rekrutmen (pencalonan) politik adalah sebagai sarana merekrut dan menyeleksi masyarakat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui pemilu.

Pada umumnya, terdapat dua pola sistem seleksi kandidat. *Pertama*, inklusif (terbuka) bagi siapapun dapat mencalonkan melalui partai politik dengan memenuhi syarat ringan (*eligible*). Jadi, tidak ada keharusan menjadi anggota partai tersebut, ataupun kesamaan ideologi. *Kedua*, pola eksklusif (tertutup), terdapat sejumlah syarat yang membatasi hak pemilih untuk ikut serta dalam seleksi kandidat. Misalnya, ada syarat khusus bagi kandidat yang ikut diseleksi. Sebagai contoh, kader yang dapat diseleksi harus memenuhi syarat yakni selama 3 tahun berturut-turut menjadi anggota partai dan mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan ideologi dan garis perjuangan partai. Singkat kata, semakin inklusif proses seleksi kandidat, maka semakin demokratis. Sebaliknya, semakin eksklusif seleksi kandidat semakin tidak demokratis seleksi itu—tidak transparan dan hanya internal elit saja sebagai penyeleksi ataupun penentuan kandidat (Rahat dan Hazan, 2006: 110).

Terkait perekrutan kandidat secara inklusif (terbuka), meski syarat dari internal partai cukup ringan, namun ada dua faktor yang cukup menentukan terekrutnya anggota luar menjadi kandidat. Sebagaimana menurut Rahat dan Hazan: *Pertama*, syarat keterjaminan terpilihnya kandidat tersebut (tingkat elektabilitas). Dalam kerangka politik lokal, proses seleksi kandidat terletak pada rekam jejak seorang figur. Rekam jejak dan popularitas ini sangat menentukan dapat diterimanya seseorang oleh masyarakat. Prestasi seorang Bupati misalnya, ditimbang melalui neraca rasionalitas, untuk menentukan apakah bisa dianggap telah mencapai hasil yang dijanjikan atau tidak. Karena itulah, dalam kultur pragmatis, elektabilitas incumbent akan sangat tinggi. Elektabilitas ini akan mujarab dan menjangkau lintas-kelompok, etnis, agama, dan seterusnya, karena hal-hal yang bersifat konsep dan ideologis telah diabaikan melalui kompromi dan toleransi.

Kedua, faktor biaya. Pertimbangan penentu dalam perekrutan kandidat orang luar adalah dari segi biaya. Hal ini karena keikutsertaan dalam pilkada membutuhkan banyak biaya. Kebutuhan dana yang inheren dalam pilkada. Dana sebagai alat peraga dalam kampanye (kaos, poster, rontek, spanduk, baliho, iklan di media massa). Faktor uang menjadi penting bila kandidat ingin dapat dukungan dari sebuah partai harus memberi sejumlah uang, dengan berbagai istilah seperti sumbangan, pembinaan,

dan sebagainya. Situasi ini akan muncul terutama sekali jika kandidat yang dimunculkan partai berasal dari luar partai. Namun, hal ini juga bisa terjadi kemungkinan dari kader partai yang harus menyeter sejumlah uang ke partai (Pamungkas, 2010; 3). Sementara itu, uang juga diperlukan untuk memikat pemilih. Pemilih melihat uang dalam pilkada sebagai insentif bagi mereka atas pilihan yang mereka berikan. Pemilih akan memberikan dukungan suara ketika mereka menerima kompensasi uang dari kandidat. Pemilih tidak melihat peristiwa itu sebagai pragmatisme tetapi lebih pada mekanisme barter yang disepakati tanpa harus melihat itu sebagai sesuatu yang buruk.

Kedua faktor penentu diatas, partai tetap memperhitungkan kemampuan finansial kandidat. Pertimbangan akan keputusan terekrutnya seorang kandidat pertama-tama terletak pada tingkat elektabilitas kandidat, sedangkan pertimbangan berikutnya adalah faktor finansial. Logikanya, bukan kemampuan finansial menjadi penentu, tetapi kalkulasi kemenangan. Dalam pilkada, biaya politik yang berupa uang memang penting, tetapi kepastian menang adalah lebih penting. Dengan demikian, pengorbanan atas biaya yang dikeluarkan menjadi pertimbangan rasional partai untuk merekrut orang yang potensial. Di satu sisi, partai bersedia menanggung biaya pemenangan, sisi lainnya adalah kesepakatan antara partai dan kandidat yang terekrut.

c. Faktor-Faktor Penting dalam Pemenangan Kompetisi

Pemilu kepala daerah yang berbasis kompetisi merupakan momentum tepat bagi partai manapun untuk memenangkan kandidatnya. Atas persoalan ini menjadi faktor penting dalam keputusan penentuan calon bupati dan wakil bupati sebagai kandidat yang potensial bagi partai. *Pertama*, dari segi penguasaan birokrasi yang berarti dapat melibatkan birokrasi secara langsung maupun terselubung untuk mendukung pemenangan. *Kedua*, dalam segi penentuan kebijakan dalam aspek kepentingan umum dalam menciptakan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam masyarakat.

Kedua hal diatas sangat menentukan dalam pemenangan pilkada, terutama dalam konteks politik lokal/daerah. Dengan demikian, birokrasi menjadi sarana yang ampuh untuk berbagai kepentingan pemenangan pilkada. Selain itu, kesuksesan pembangunan riil yang bisa dilihat oleh

masyarakat, merupakan nilai tambah yang bisa dimanfaatkan oleh kandidat tertentu demi kemenangannya.

3. Memahami Perilaku Parpol: Analisis Simultan terhadap Domain Internal dan Eksternal

Hubungan logis antara seleksi internal dan eksternal dalam rekrutmen kepala daerah adalah berdasarkan standar normatif kandidasi untuk mengisi jabatan kepala daerah (AD/ART partai). Ketika kandidat terekrut dari nilai rasional yang berbeda dengan *common values*, maka menjadi tindakan pragmatisme karena tidak dikawal dengan idealisme sejak awal.

Uraian tentang analisis internal dan eksternal diatas, bisa ditegaskan beberapa hal terkait seleksi kandidat dalam Pilkada Sleman 2010. Secara teoritis, dalam budaya pragmatis masyarakat seperti di atas, pragmatisme politik tidaklah menjadi persoalan. Hal ini karena sikap normatif telah kalah oleh pertimbangan jangka pendek, sehingga masyarakat menilai prestasi adalah dari hasil, tanpa melihat cara atau proses. Nilai-nilai atau ideologi telah luntur oleh proses kompromi dan aspek kepraktisan. Pragmatisme masyarakat menjadikan publik tak mau ambil pusing dari mana sumber dana untuk suatu hasil tersebut (Pamungkas, 2010; 4).

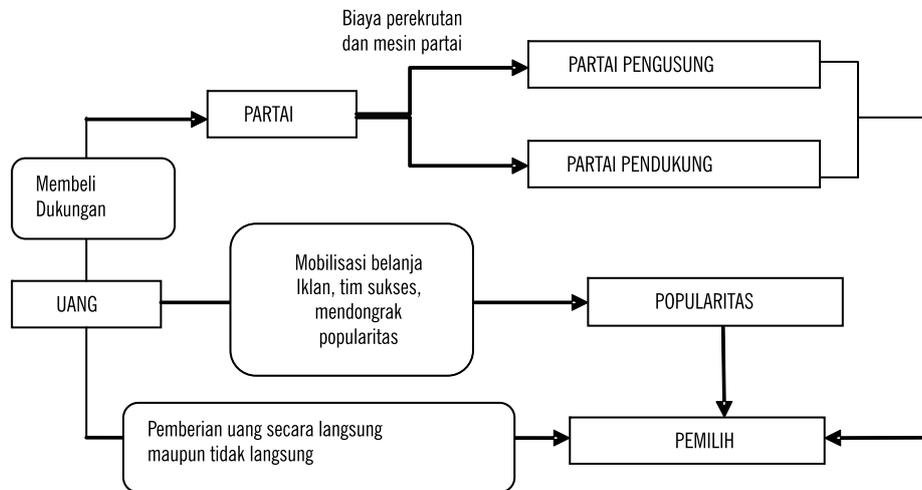
Dampaknya, politik uang pun berjalan wajar, alami, dan tumbuh subur. Uang telah dirasionalisasi sebagai istilah *take and give*—suatu keharusan dalam Bergeraknya mesin politik di masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika akan dijumpai dominannya peran uang dalam proses politik lokal. *Pertama*, dalam hal kaderisasi di internal partai. *Kedua*, orang luar dalam proses seleksi kandidasi untuk mengisi jabatan kepala daerah yang berbasis persaingan. Keduanya adalah alur pragmatisme yang telah menjadi sebuah siklus yang utuh: bersumber dari masyarakat yang plural dan pragmatis, lalu dikapitalisasi oleh partai politik menjadi faktor kemenangan pemilu menuju kekuasaan, dan diterima kembali oleh masyarakat melalui politik transaksional, yakni diperolehnya pemimpin yang kompatibel dengan keinginan masyarakat.

Persoalan diatas, menunjukkan bagaimana kita membaca praktik politisi di partai politik yang menjadikan pragmatisme sebagai sekadar strategi memenangi kontestasi di Pilkada? Pragmatisme politik bukan lagi bertujuan *get things done*, yakni mencari kepemimpinan yang tidak serba

gamang tetapi piawai dalam tataran konsep dan piawai dalam pelaksanaan, melainkan berbentuk “kapitalisasi” politik, yaitu pengorganisasian segala sumber daya untuk pemenangan pemilu dan imbal baliknya. Cirinya antara lain adanya koalisi pragmatis, subordinasi kader atas nama popularitas, serta bagi-bagi dana anggaran di birokrasi, legislatif, dan masyarakat. Inilah arus besar pragmatisme politik dalam meraih kemenangan. Jika demikian, partai politik gagal dalam menjalankan fungsi kaderisasi. Salah satu ciri dari kegagalan ini adalah partai tidak mampu mengaktifkan mesin politiknya dan mengkapitalisasi kader internal partai menjadi sebuah sumberdaya keuangan maupun elektabilitas/popularitas.

Pada akhirnya, partai kesulitan menjalankan siklus kaderisasi, sehingga tidak mempunyai kader handal yang pantas ditampilkan. Partai merasa lebih praktis dan taktis dengan menunggangi pragmatisme masyarakat yang permisif, sehingga melembagakan demokrasi transaksional. Pragmatisme tampil dalam bentuk usaha partai politik mencari figur populer yang paling prospektif untuk pemenangan pemilu. Jika figur prospektif tersebut diusung partai lain, maka terjadilah koalisi pragmatis. Pada titik ini, jarak ideologi antara partai tidak masalah. Yang lebih penting daripada itu adalah kalkulasi kemenangan kandidat dan untuk memenuhi syarat administrasi dalam pilkada. Adapun kader partai yang tidak populer pun harus tersingkir, atau dengan bahasa lain harus mengalah. Selanjutnya, uang menjadi pelicin untuk mengegolkan kandidasi, menjalankan mesin partai, dan merebut simpati masyarakat.

Di sinilah kita bisa melihat pragmatisme politik dalam bentuk politik uang. Dalam pilkada, uang dapat dikonversi dari satu bentuk ke bentuk yang lain dengan cepat. Dalam pilkada, uang dapat dipertukarkan dengan cepat menjadi baliho, spanduk, rontek dan iklan. Tim kampanye dapat terbentuk dengan cepat, jumlah uang yang banyak dan merata (Pamungkas, 2010c). Selain itu, uang juga dapat dikonversi menjadi berbagai fasilitas pendukung kampanye dan menyewa konsultan politik secara profesional. Uang bekerja sangat masif, sehingga siapa yang akumulasi uangnya banyak, dapat mengkonversinya dalam berbagai bentuk keperluan pilkada. Dengan kata lain, uang menjadi penghubung antara aktor-aktor yang berinteraksi dalam pilkada, yaitu partai, kandidat, dan pemilih. Berikut ini urutan logika bekerjanya politik uang. Lihat gambar berikut ini:



Sumber: Pamungkas, 2010

GAMBAR URUTAN LOGIKA BEKERJANYA POLITIK UANG

Urutan logika diatas dapat menggambarkan tiga wajah uang dalam pilkada yaitu, partai, kandidat dan pemilih. Uang diperagakan secara berbeda (1) Partai; uang sebagai kompensasi dukungan partai pengusung dan partai pendukung terhadap pencalonan kandidat dan uang untuk menggerakkan mesin partai, (2) Popularitas Kandidat; uang sebagai alat untuk pembiayaan kampanye dan mendongkrak popularitas, (3) Pemilih; uang adalah insentif untuk memilih seorang kandidat.

Situasi itu akan muncul terutama sekali jika kandidat yang dimunculkan berasal dari luar partai. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dari kader partai pun juga harus menyetor sejumlah uang ke partai. Akibatnya, yang terjadi adalah komersialisasi ketika Pilkada (Pamungkas, 2010; 2). Kondisi ini karena otoritas untuk menentukan calon yang akan diajukan partai dalam pilkada dipegang oleh pengurus partai. Dengan kata lain, komersialisasi partai terjadi karena otoritas untuk menentukan penetapan kandidat partai ditentukan oleh partai. Diasumsikan, anggota partai yang disebutkan dalam AD/ART Partai sebagai pemegang kedaulatan partai, tidak terlibat atau tidak memiliki otoritas dalam penentuan kandidat.

Sementara itu, pemilih yang melihat uang dalam pilkada adalah uang menjadi insentif bagi mereka atas pilihan yang mereka berikan. Pemilih akan memberikan dukungan suara ketika mereka menerima kompensasi uang dari kandidat. Pemilih tidak melihat peristiwa itu sebagai

pragmatisme, tetapi lebih pada mekanisme barter yang disepakati tanpa harus melihat itu sebagai sesuatu yang buruk. Secara teoritis, dapat kita baca ketemunya antara akseptabilitas kandidat dengan pengakaran partai yang sama-sama rendah. Motif subjektivitas pemilih muncul secara liar karena akseptabilitas kandidat dan mesin partai rendah.

Dalam Pilkada, kandidat yang muncul acapkali bukan orang yang populer atau memiliki akseptabilitas yang baik di masyarakat. Mereka pada umumnya individu-individu yang kurang akrab dengan masyarakat (Marijan, 2006). Sebagai kompensasi atas hal itu, kandidat kemudian menempuh jalan pintas mendekati diri ke dalam masyarakat melalui politik uang. Pada saat bersamaan, partai juga gagal menjadi mesin politik yang efektif melakukan ideologisasi pemilih. Di luar momentum pilkada, partai pun absen mendidik rakyat dalam kerja-kerja basis dan pengorganisasian. *Party identification* pemilih kemudian tidak terbentuk sehingga yang ada massa cair tanpa orientasi politik yang jelas (Erawan, 2005). Kalaupun partai bekerja ketika pilkada, seringkali larut dalam logika pragmatis dalam melakukan persuasi kepada pemilih. Singkat kata, partai-partai politik sebagai pemburu kekuasaan (*office seeking*) terjebak pada cara-cara praktis dan jangka pendek. Tujuannya memperoleh suara terbanyak (*vote seeking*). Dengan begitu, partai mengabaikan cara-cara dalam normatif partai.

Studi ini membatasi kajian pada perilaku politik PDI-P dalam proses seleksi kandidat. Kajian teoritis menggunakan analisis pragmatisme. Konsepsi ini akan melihat proses seleksi kandidat yang menjadi keputusan PDI-P. Dengan begitu, apakah keputusan terekrutnya kandidat berbasiskan kerja partai yang mencerminkan normatif AD/ART partai atau tidak? Jika tidak, maka ia disebut pragmatis—mengutamakan praktisnya saja dengan jangka pendek (instan) tanpa memperhatikan efek jangka panjang. Hal ini dapat berakibat negatif terhadap partai tersebut. Sesungguhnya, pragmatisme politik dapat bermakna positif jika mempertimbangkan nilai-nilai normatif yang terdapat pada normatif masyarakat. Logikanya, sesuatu yang berlaku secara umum itulah konsep *common values*. Namun, ketika ia keluar dari rasional umum ini, maka disebut pragmatis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus yang terkait dengan pragmatisme politik dan proses rekrutmen politik PDI-P pada Pilkada sleman, 2010. Untuk itu, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer menggunakan wawancara mendalam dengan pengurus partai, legislatif dan teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang telah dipublikasikan, baik di media massa maupun aturan-aturan hukum yang telah diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah bersifat analisis deskriptif dengan mengkaji data primer yang diperoleh dari lapangan, kemudian di triangulasi dengan sumber-sumber sekunder untuk dianalisis untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

HASIL DAN ANALISIS

1. Budaya Organisasi PDI-P Sleman

Selain budaya politik masyarakat Sleman yang pragmatis sebagaimana akan dikemukakan berikutnya, faktor lain yang sangat mempengaruhi pilihan PDI-P dalam rekrutmen kandidat di Pilkada Sleman 2010 adalah faktor pragmatisme politik organisasi yang terjadi di internal PDI-P itu sendiri. Budaya organisasi PDI-P dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Indikator pertama adalah ideologi pancasila yang dipakai PDI-P. Ternyata, ideologi PDI-P yang telah terumuskan, kadang tidak sesuai dengan realisasinya dalam apa yang diucapkan dan dipraktikkan. Hal ini dapat kita lihat, misalnya bagaimana PDI-P mentransformasikan ideologi tersebut dalam isu kemiskinan di Sleman. Ideologi sebagai metode, adalah cara melihat dan mengatasi suatu persoalan kemiskinan dan sekaligus sebagai evaluasi kerja partai. Kenyataannya, angka kemiskinan pada tahun 2005-2010 terus meningkat. Bukti ini mencerminkan bahwa ideologi partai tidak berjalan, karena tidak terejawantah pada strategi bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan problem kemiskinan.

Di sisi lain, dapat dilihat pada bagaimana wajah partai di akar rumput berjalan. Seperti jamak diketahui, mesin partai tidak berfungsi sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Realitas ini dapat kita lihat dalam angka kemiskinan dan kesehatan dari tahun ke

tahun terus meningkat. Karena itu, ideologi partai hanya tampak pada perhitungan untung rugi, lebih mengutamakan logika pasar dibanding ideologi yang jelas, program yang terstruktur, atau pendukung yang loyal. Selanjutnya, peranan dari budaya politik berkenaan dengan pengaruh lingkungan sosial. Dalam hal ini, pola kepemimpinan. Terkait itu, apakah PDI-P menuntut konformitas atau mendorong inisiatif? Dalam konteks PDI-P Sleman, struktur partai hanya memampang orang lama, yang berarti kader-kader partai yang berasal dari generasi tua. Tidak tampak adanya regenerasi sosok yang menduduki jabatan di struktur partai. Kader yang tidak memiliki akses pertemanan atau *klik* ke elit partai ataupun bermodal tebal, tidak akan mendapat posisi tersebut.

Budaya organisasi PDI-P bisa dianalisis dari dua aspek, yakni: (1) kegagalan kaderisasi PDI-P dan; (2) uang sebagai penentu perekrutan kandidat.

a. Kegagalan Kaderisasi PDI-P

Persoalan kader sebagai regenerasi partai tidak pernah mendapat perhatian serius dari elit partai. Keberadaan kader partai didominasi senior yang berasal dari faktor insidental. Dikatakan insidental, karena secara individual mereka dipertemukan pada kondisi represif Orde Baru. Dalam *Kompas* (9 Juni 2010, p.6) mereka menjadi anggota bukan karena PDI-P mempunyai program yang memiliki daya pikat, melainkan karisma kebesaran nama Bung Karno, yang terdapat pada figur Megawati. Megawati diyakini dapat mengintegrasikan kader partai di segala level.

Karena itu, PDI-P tidak memiliki rute-rute kaderisasi untuk mengisi jabatan di struktur partai, legislatif, maupun eksekutif. Padahal, posisi kader dalam ketiga pilar demokrasi di atas adalah sangat penting. Dalam *Kompas* (3 April 2010, p.4) sebagaimana diamati Ambardi, pola perekrutan sumber daya partai, terutama individual yang nanti ditempatkan dalam posisi-posisi di pemerintahan, dipersiapkan untuk mengisi dan berkompetisi dalam pemilu berikutnya. Namun, pada saatnya, mau tak mau PDI-P harus melakukan rekrutmen politik untuk memperebutkan jabatan kepala daerah. Kondisi ini dapat dipahami dari sikap PDI-P yang tampaknya tak ingin mengulangi pengalaman Pemilu 1999, yakni sebagai partai pemenang Pemilu tetapi tidak terpilih sebagai presiden dan tak mendapat posisi strategis seperti jabatan ketua DPR RI atau ketua MPR RI.

Dalam konteks pilkada, keputusan pencalon bupati dan wakil bupati, maka PDI-P mengambil orang luar yang potensial dan terukur. Kriterianya adalah incumben yang sudah teruji dan terkenal dalam menguasai birokrasi pemerintah seperti Sri Purnomo. Penguasaan birokrasi ini bertujuan untuk mempersiapkan partai menjadi lumbung suara pada Pemilu 2014. Meskipun terjadi konflik terbuka di internal partai tetapi lebih penting memastikan menang dalam Pilkada daripada menjaga konstituen kader partai. Inilah sikap pragmatis politik di PDI-P yang keluar dari standar normatif partai yang berbasis AD/ART partai.

Kasus Sleman, terlihat bagaimana dicalonkannya Yuni adalah kader yang diciptakan untuk tergantung pada elit PDI-P. Karenanya, Yuni tidak mengakar pada level bawah. Singkat kata, kader artifisial selalu memiliki keterbatasan sebab hanya bertumpu pada upaya menciptakan kesadaran palsu. Karena secara konstituen, Yuni tidak kritis. Hal ini menunjukkan seolah hanya berurusan pada partai. Kenyataannya, ketika terpilih menjadi wakil bupati harus menjalankan tanggung jawab besar. Prinsip internal partai bukan berarti jauh dari urusan publik. Bagaimanapun partai politik tetap entitas yang selalu berurusan dengan publik.

Secara detail, kaderisasi PDI-P belum mampu memunculkan orang populer yang integritasnya tidak diragukan lagi. Belum ada upaya partai bagaimana melakukan terobosan dalam kaderisasi yang terlembaga. Bila dilihat dari segi manajemen partai masih tradisional. Dalam kasus melibatkan kader dalam menjangkau kandidat untuk mengisi jabatan kepala daerah belum efektif dan modern. Efektif dalam arti dari segi waktu tanpa harus memerlukan waktu bertahun-tahun untuk membangun karakter kader. Dan modern dipahami sebagai kerja kader partai yang profesional. Logikanya, keberhasilan kader untuk mengisi jabatan struktur partai, legislatif dan eksekutif sesuai dengan pengorbanannya. Dalam pemahaman itu, kedaulatan kader ada sepenuhnya pada kader partai untuk menentukan kandidat partai yang merupakan aspirasi akar rumput. Dengan kata lain, perekrutan kandidat untuk mengisi jabatan kepala daerah berdasarkan kerja program partai.

Karena itu, PDI-P mengalami dilema sebagai partai pemenang yang dukungannya memperbesar peluang untuk menang. Terpilihnya Sri Purnomo adalah aktor strategis bagi kemenangan di Pilkada. Basis sosial

Purnomo adalah Muhammadiyah yang basisnya terbesar setelah PDI-P. Meskipun ada kekuatiran PDI-P Sleman akan adanya resistensi di akar rumput PDI-P (Wawancara dengan Toto Hedi, 17 Agustus 2010). Kenyataan itu, tidak pernah terjadi karena terbukti selama lima tahun Sri Purnomo menjadi wakil Bupati yang berpasangan dengan Bupati Ibnu Subianto. Kalau pun ada resistensi ini tidak begitu signifikan, terutama dalam pembangunan ideologis partai. PDI-P sangat kuat di level bawah karena kaum abangan tersebar di pedesaan Sleman dan mereka memiliki budaya politik yang terjadi dari turun temurun, yakni basis PNI-partai yang didirikan Soekarno. Baik kaum muda dan tua di pedesaan Sleman masih sangat mengidolakan Soekarno.

Dilema politik PDI-P sesungguhnya bukan pada nilai-nilai yang diyakini basis partai berubah, tetapi ketidak-patuhan Sri Purnomo dalam menjaga komitmen kontrak politiknya saat mencalonkan melalui PDI-P. Isi kontrak tersebut salah-satunya mendukung keputusan partai dalam memperjuangkan pilihan presiden. Di samping itu, dapat dilihat kontra kemunculan Yuni. Sebagaimana gambaran tahapan proses pencalonan di atas. Yuni sangat mudah menangkap kebutuhan dana yang inginkan oleh PAC. Dalam *Kedaulatan Rakyat* (14 Januari 2010; 6) Yuni menyatakan siap maju sebagai wakil bupati. Meskipun, ia belum ketahui siapa pasangannya. Yuni adalah mantan ketua LSM Cut Nya' Dien Yogya, periode 1992-sekarang sedang menyelesaikan kandidat P.hd di Universitas Malaysia. Dan pernah juga jadi calon legislatif Dapil Gunungkidul. Nomor urut 7. Tapi tidak terpilih. Selain itu, juga sang suami Yamin (pernah menjadi calon legislatif dapil Jateng tapi tidak terpilih. Sekarang menjadi asisten pribadi Taufik Kiemas - Ketua Dewan Pertimbangan DPP PDI-P).

Munculnya Yuni tanpa melalui tahapan prosedur berlapis-lapis mendapat reaksi keras dari tiga orang pengurus PAC, yakni Sujatmiko (Tempel), Bismo Nugroho (Kalasan), dan Agus Subagyo (Depok) yang mendapat reaksi pemecatan. Menurut Sujatmiko dkk, bahwa Yuni tidak dikenal di akar rumput dan dianggap kader karbitan (Wawancara dengan Sujatmiko, 28 Juni 2010). Sikap mereka dinilai tidak loyal kepada partai. Sistem harus ditegakkan, karena tidak mungkin suara tiga orang mengalahkan suara 14 orang di ranting partai (Wawancara dengan Juwanto, 27 September 2010). Dengan begitu, sistem harus menyelesaikannya. Karena tanpa

sistem, partai bisa terpecah-pecah dan sulit memenangkan kandidat yang diusung partai, sehingga keluarnya rekomendasi nama pasangan Purnomo-Yuni adalah sebagai garis perjuangan partai harus ditaati.

Persoalan diatas adalah salah satu bagian pragmatisme politik PDI-P dalam pilkada Sleman adalah tidak komitmen aspirasi konstituen yang tercermin dalam sikap penolakan PAC terhadap pencalonan Yuni. Kenyataan ini, mengapa Yuni tidak dicalonkan sebagai Wakil Bupati dengan Suharto di Gunungkidul, dalam Pilkada 23 Mei 2010, sebab Yuni pernah maju Caleg DPRD Provinsi DIY. Pragmatisme politik internal partai berdasarkan beberapa aspek yang telah diuraikan diatas merupakan kelemahan dalam menjalankan fungsi-fungsi normatif partai. Dengan demikian, keputusan politik di partai menjadi sangat pragmatis dan berimplikasi pada kegagalan PDI-P mengusung kandidat dari internal partai. Pada akhirnya, Sri Purnomo yang notabene bukan kader PDI-P “mau tak mau” menjadi pilihan partai untuk mengatasi krisis kaderisasi dan mengatasi kelangkaan sumber daya.

b. Uang sebagai Penentu Perekrutan Kandidat

PDI-P Sleman memperlihatkan rendahnya derajat keterlibatan aktif dengan basis konstituennya. Kedaulatan anggota partai belum diakui dan dihargai oleh pengurus partai. Inilah tanda bahwa partai belum bersifat pragmatik. Kriterianya, uang menjadi penentu perekrutan kandidat. Akibatnya, kader berkualitas—dalam segi pengalaman dan lebih mengakar di arus bawah partai—terpental sebelum bertarung. Jadi, anggota partai sebagai pemegang kedaulatan partai tidak terlibat sama sekali dalam menentukan kandidat. Hanya kandidat bermodal tebal yang dapat menggerakkan mesin partai. Karena bagi elit partai, kemenangan kandidat di Pilkada adalah strategi untuk menghadapi Pemilu 2014. Selain itu, uang dapat dikonversikan menjadi fasilitas pendukung kampanye.

Tim struktural partai adalah tim sukses kandidat partai yang mendapat rekomendasi legal dari pusat, yakni pasangan Sri Purnomo dan Yuni Satya Rahayu. Tim struktural terdiri dari anggota legislatif yang berasal dari daerah pemilihannya di Sleman. Para anggota dewan ini mengeluarkan duit pribadi untuk mengawal pada malam pencoblosan itu. Sejalan dengan instruksi dari tingkat pusat, PDI-P Sleman malam itu menurunkan seluruh

kader yang militan di setiap TPS; tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Karena itu, uang yang terkumpul dari anggota dewan dibagikan kepada para kader yang militan di semua tingkatan sebagai honor. Seperti diungkapkan Endi Hariono: “Untuk memenangkan satu putaran, kita membeli suara pemilih dengan membayar bervariasi, antara Rp 20.000 sampai dengan Rp. 50.000/orang.”

Namun, politik uang kemungkinan terjadi hanya sekitar 5 sampai dengan 10 persen dari jumlah pemilih. Menurutnya, antara basis PDI-P dan Muhammadiyah masih ada pengikut loyal yang tak perlu diimingi uang. Jadi, uang hanya diberikan sebagai imbalan kerja semi-formal bagi kader partai yang bekerja pada malam itu, dalam kerangka target kemenangan satu putaran. Senada dengan hal di atas, Totok Hedi menyatakan bahwa:

“Dalam segala aktivitas partai tingkat kecamatan juga harus diuangkan. Praktiknya, anggota partai tak ada yang datang bila tak ada uang. Uang secara resmi dibelanjakan untuk segala kebutuhan logistik, khususnya malam sebelum hari pencoblosan. Para peserta ini terdiri dari simpatisan kader partai yang sangat cair. Tidak punya ikatan apapun dengan partai tetapi bila ada kegiatan partai mereka diundang datang di tingkat kecamatan melalui kontak person partai. Praktik politik uang terjadi ketika kader partai melobi orang di desa sebagai calon pemilih, kalau didatangi seseorang dalam rangka kepentingan tertentu, seperti anak kecil, kalau tidak diajak “jajan” tidak akan ditanggapi. Berkaitan dengan logistik dan uang transportasi peserta. Jadi, ketika menjelang sosialisasi kandidat di tingkat kecamatan yang pesertanya dari desa, baik di tempat terbuka maupun tertutup mereka harus di”sangoni”, minimal untuk logistik makan-minum. Meskipun, mobil yang disediakan biasanya dari panitia. Tetapi uang selalu tersedia bila dibutuhkan untuk pertemuan-pertemuan partai” (Wawancara dengan Toto Hedi, 17 Agustus 2010).

Terkait mobilisasi inilah, selalu berkaitan dengan uang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tri Widaryanta (Wawancara, 20 Agustus 2010):
“Kebutuhan uang tak pernah cukup untuk biaya mobilisasi massa secara besar-besaran”. Sampai malam pencoblosan pun, uang sangat menentukan bisa datang atau tidaknya para kader yang militan. Kalau tidak ada uang untuk mereka, para kader tidak akan datang”.

Kekuatan uang ini pula yang memikat kader bisa terlibat pada hari pencoblosan sebagai pengawal kotak suara. Uang yang bersumber dari anggota dewan tadi, dijadikan sebagai tawaran kepada kader militan untuk melobi pemilih lain. Jika kita telusuri lebih jauh, penggunaan uang dalam pemilihan kepala daerah memang tidak terkendali. Uang adalah faktor penting untuk menyokong berbagai kegiatan kampanye. Dengan kata lain, tanpa uang sangat sulit bagi kandidat dapat memenangkan pilkada. Uang digunakan berbagai kepentingan, mulai dari pengadaan material kampanye, logistik, hingga pembiayaan tim sukses dan pendukungnya.

Ada beberapa program kampanye yang harus dibiayai oleh para pasangan calon. Berbagai program dan jenis pengeluaran pada masa kampanye pasangan Sri Purnomo dan Yuni. *Pertama*, mobilisasi massa pada pengerahan massa. Pengeluaran operasional pengerahan massa ini membutuhkan dana sangat besar. Tim sukses pasangan Sri Purnomo-Yuni, misalnya mengatakan pengeluaran yang dilakukan untuk operasional itu tidak kurang dari 2 Miliar. Yang menghabiskan dana paling besar adalah operasional kampanye. Ribuan kendaraan roda 2 dan 4 peserta kampanye membuat pasangan ini mengeluarkan Rp 10.000 s.d Rp 20.000 untuk satu motor dan Rp. 30.000-40.000 per roda empat untuk biaya BBM. Karena itu, ia mengeluarkan dana miliaran, sedangkan untuk baliho, pamflet dan sebagainya membutuhkan sekitar 500 Juta. Biaya *open house* juga harus mengeluarkan ratusan juta rupiah. Biaya operasional ini termasuk di dalamnya adalah honor, biaya bensin, dan sebagainya.

Dengan demikian, massif kebutuhan uang dalam pilkada ini menjadikan partai melakukan segala cara untuk memenuhinya. Salah satu caranya dengan merekrut orang luar yang mampu memenuhi kebutuhan keuangan tersebut.

2. Budaya Politik Masyarakat Sleman

Budaya politik masyarakat Sleman merupakan salah satu faktor dalam menentukan kandidat yang akan diusung di Pilkada Sleman 2010. Secara umum, budaya politik Sleman yang masih sangat paternalistik. Orientasi politik masyarakat masih tersegmentasi dalam kelompok-kelompok kultural semacam keagamaan dan juga kelas sosial. Meskipun ditopang dengan banyak LSM yang ada di Sleman sebagai cermin masyarakat yang

independen, namun ternyata tidak mudah memutuskan faktor paternalisme yang berarti mudah menuruti perintah sang patron.

Yogyakarta sebagai sentrum politik Kesultanan yang terjadi akhir-akhir ini, sesungguhnya mempercepat proses transisi tersebut. Satu sisi, masyarakat Sleman khususnya dan umumnya masyarakat Yogya masih cenderung membabi-buta terhadap fenomena penetapan. Dalam *Kedaulatan Rakyat* (5, 6 dan 11, Desember 2011;2), mengidentifikasi bahwa kelakuan politik keseharian masyarakat Sleman pada hakikatnya belum menunjukkan kematangan berpolitik. Akselerasi isu penetapan ini sesungguhnya membuat sikap politik masyarakat itu terbelah.

Sisi lainnya, Pilkada adalah momentum penting bagi masyarakat untuk memeras kandidat yang dibungkus dalam kegiatan aksi-aksi sosial, keagamaan dan kesenian. Logikanya, jika pasca pemilu masyarakat kesulitan untuk menuntut bantuan amal ataupun kesenian. Selain itu, selama ini dampak dari pilkada lima tahun lalu tidak membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat. Jadi, masyarakat dengan mudah mengorganisir diri mereka dalam bentuk menawarkan proposal untuk pembangunan infrastruktur di setiap dukuh.

Dalam masyarakat Sleman, masih terdapat sisa-sisa kultur kekuasaan feodal, bentuk relasi patron-klien antara bawahan dan atasan, atau antara penguasa dengan rakyat. Sistem masyarakat ini merupakan warisan dari struktur masyarakat keraton Jawa, dan terlembaga dalam institusi kultural yang kuat. Sebagaimana diamati Ari Dwipayana, dalam *Kompas* (19 Januari, 2011; 4):

“bukan hanya karena politik transaksional kian menguat, tetapi juga sebab kehadiran kembali karakter feodalisme baru dalam ranah politik nasional ataupun lokal. Namun, sesungguhnya kecemasan akan hadirnya neofeodalisme dalam demokrasi semacam ini bukan sesuatu yang baru. Ada akar historis yang panjang dan bisa ditemukan dalam debat di kalangan Indonesianis tentang kegagalan eksperimentasi demokrasi liberal pada era 1950-an”.

Terkait budaya birokrasi, hubungan atasan dan bawahan (patron klien). Pada tingkat yang lebih tinggi birokrasi dianggap koruptif, pencari rente, mengabdikan kepada kepentingan kelompok pemilik modal dan mewakili kepentingannya sendiri. Hubungannya dengan kekuasaan, birokrasi dilihat

bersengkongkol dengan partai politik tertentu sehingga menjadi alat penguasa, bukan alat negara (Pamungkas, 2006; 48-63).

Seperti diperlihatkan Djoko Handoyo—Assek III Pemkab Sleman, yang membantu Sri Purnomo yang maju calon bupati—PNS berpolitik praktis jelas melanggar peraturan SE.Menpan.Nomor.SE/8/M.PAN/3/2005. Menurut Pamungkas, sebagaimana dikutip *Radar Jogja* (27 Maret 2010; 6) bahwa menggerakkan roda birokrasi untuk kepentingan incumben itu, ibarat gunung es. Karena itu, modus yang digunakan tidak secara terang-terangan tapi terselubung. Istilahnya, tim bayangan, namun justru memiliki peran vital dan menjadi kunci dari tim pemenangan. Seolah pucuk saja yang terlihat. Padahal birokrasi di bawahnya itu tentu akan bekerja juga untuk kepentingan incumben.

Karena itu, *incumbent* yang menggunakan mesin birokrasi akan berujung pada penyalahgunaan anggaran belanja (APBD), bisa jadi APBD untuk kepentingan politis. Masalahnya, kemudian menjadi efek jangka panjang bergerakinya mesin birokrat dan berpotensi konflik, jika ternyata incumben tidak berhasil menduduki kembali kursi sebagai bupati. Dalam pemahaman itu, sudah menjadi kebiasaan bagi para PNS di lingkungan pemerintahan yang terbuai dengan kenyamanan yang sudah terbentuk, sehingga para PNS cenderung mendukung kepemimpinan incumben.

Dari segi arus informasi, persinggungan dan pergaulan dengan pihak luar, munculnya pendatang, dan seterusnya, semuanya mendorong terciptanya atmosfer modernisasi di Sleman. Akan tetapi, kultur masyarakat yang “transisi” ini belum siap sepenuhnya untuk menjembatani pluralisme. Akibatnya, muncul ekses negatif modernisasi. Sikap pragmatis menjadi melenceng dari norma. Tujuan *get things done* yakni, masyarakat yang merindukan pemimpin yang berwatak aspiratif dan akomodatif, beralih menjadi semata pencarian “jalan pintas” tanpa mau tahu dampak atau positif-negatifnya. Karenanya itu, mengemuka bukanlah cara-cara praktis untuk memecahkan masalah atau menjembatani perbedaan demi tujuan bersama, melainkan sikap permisif dalam kehidupan sehari-hari.

Ada beberapa ciri sikap permisif ini. *Pertama*, nilai-nilai moral tidak lagi menjadi sandaran atau rujukan untuk memahami suatu perilaku. Satu contoh, sikap permisif muncul dalam bentuk begitu mudahnya masyarakat mengampuni kesalahan, mudah menghilangkan kekurangan

dari ingatan, dan akhirnya tidak bersikap keras untuk mengambil tindakan korektif terhadap kesalahan tersebut. Manusia Indonesia tahun-tahun belakangan ini menonjol sikap permisif terhadap pelanggaran dan penyelewengan (lihat bab 2, kasus Ibnu Subianto, Jarot dan empat orang pegawai Sleman dalam melakukan tender pelelangan buku). Dalam konteks ini, *track record* seseorang yang suram tidaklah menjadi persoalan, sepanjang ada hal-hal riil saat ini yang bisa dikerjakan orang tersebut bagi masyarakat. *Kedua*, ciri permisif adalah mudahnya konflik meletus, tanpa menimbang bobot suatu persoalan. Terkait ini, hal-hal yang sepele bisa memicu anarkisme, meski masyarakat bisa dengan mudah memaafkan dan melupakannya. Dalam kasus ini, dapat dilihat perseteruan Sukamto vs Hafidh dalam menentukan kandidasi PKB Sleman untuk maju dalam pilkada.

Dalam konteks budaya politik, sisi negatif pragmatisme ini mewujud dalam bentuk kecenderungan orang sekadar mengukur nilai kepraktisan dalam menjalankan perilaku politiknya. Dalam *Kompas* (18 Juni 2010; 2) apa yang bisa menghasilkan sesuatu, itulah yang akan diikuti dan dibela. Dengan demikian, sikap atau pilihan politik tidak ditentukan oleh ideologi, ataupun oleh suatu *common orientation* semata, melainkan oleh sikap mencari *safety first*. Siapa yang bisa memberikan “uang lelah”, dialah yang bisa menuai dukungan massa. Demi “jaminan kesejahteraan” ini pula orang akan mau saling tawuran, dan tidak lama kemudian berkoalisi demi melawan musuh bersama. Nilai bukanlah berpatokan pada norma, melainkan nominal tertinggi yang bisa ditawarkan.

Pada budaya politik pemilih, faktor-faktor yang ada dalam budaya pemilih idealis tidak ada. Ideologi atau cita-cita moral untuk mewujudkan kemaslahatan bersama sudah luntur. Partai politik sudah melupakan ideologi sebagai panduan gerak politiknya. Partai menjadi institusi yang murni mengejar kekuasaan semata. Pada saat bersamaan, pemilih kecewa dengan perilaku partai dan politikus yang bagi pemilih dianggap mengabaikan mandat yang pemilih berikan. Pendek kata, mengutip pendapat Sigit Pamungkas (2010: 101) bahwa budaya politik protes muncul sebagai respon terhadap perilaku politikus dan partai politik. Budaya politik protes itu tidak tumbuh dari diri pemilih tetapi dipicu oleh perilaku politikus dan partai politik yang dicitrakan serba negatif.

Pemilih menganggap, wakil mereka akan segera melupakannya ketika pemilu dan tidak memberi manfaat kepada pemilih maka lebih baik mendapatkan kompensasi dimuka daripada tidak sama sekali. Kehendak untuk serba ada kompensasi material dalam aktivitas pemilu menjadikan siklus persoalan yang pemilih kritik tidak kunjung selesai. Akibatnya, politikus dan partai akan terus terjebak dalam skandal korupsi. Korupsi akhirnya berfungsi sebagai cara bekerjanya politik “*the way of doing politics*” (Lay, 2006).

Dengan demikian, seorang yang hendak terjun berpolitik, mestilah bermodal, dalam artian mapan secara ekonomi. Partai yang hendak merekrut massa, mestilah mampu menangkap kebutuhan akan “*safety*” ini, sehingga janji politik, kontrak politik, dan amplop politik menjadi bagian tak terpisahkan dari Bergeraknya mesin politik. Dalam *Kompas* (31 Januari 2011; 6) dominannya peran uang dalam proses politik lokal, semakin menemukan momentumnya dalam kultur yang permisif—serba boleh. Pragmatisme partai politik yang sekadar strategi memenangi pemilu, dipandang sebagai suatu taktik yang wajar-wajar saja. Akibatnya, elit politik di partai tidak merasa bersalah ketika lalai dalam mengkapitalisasi sumberdaya yang dimiliki. Partai politik merasa mampu saja ketika merekrut sosok asing demi memperoleh sumber dana untuk melancarkan mesin politiknya. Sampai pada titik ini, partai politik menjadi cermin sempurna kultur politik masyarakat yang pragmatis-permisif.

KESIMPULAN

Dalam studi ini, diperlihatkan bahwa rekrutmen kandidat eksternal adalah berbasiskan perhitungan untung rugi dan lebih mengutamakan logika pasar. Akibatnya, ideologi yang jelas, program yang terstruktur, atau pendukung yang loyal tidak menjadi penentu perilaku partai politik. Ukuran kandidat yang terekrut adalah berbasis popularitas dan punya uang. Dampaknya, orang luar tidak bisa mengintegrasikan kader partai di semua level dan soliditas partai semakin terfragmentasi pada kepentingan jangka pendek dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, yakni mengatasi kelangkaan dana partai untuk menggerakkan mesin partai. Untuk lebih mengerucutkan pemahaman tentang hasil penelitian ini, berikut perinciannya.

Dalam kasus Pilkada Sleman, proses rekrutmen kandidat ditandai hilangnya peran ideologi partai dan semakin berkurangnya peran anggota partai. Bukti-bukti yang saya kumpulkan; *Pertama*, logika politik PDI-P yang menonjol adalah pragmatisme yang dibungkus dengan “kapitalisasi” politik, yakni pengorganisasian segala sumber daya untuk kemenangan Sri Purnomo dan Yuni Satya Rahayu. Cara yang digunakan adalah pola transaksional untuk memperebutkan kekuasaan, yang terlihat pada strategi PDI-P untuk memenangkannya. *Kedua*, kedaulatan kader untuk terlibat dalam seleksi kandidat semakin merosot. Akibatnya, tahapan-tahapan seleksi kandidat hanyalah bungkus kecil pragmatisme yang seolah telah terjadi demokrasi di internal partai. Pada prinsipnya, PDI-P memutuskan merekrut incumben-Sri Purnomo yang merupakan calon kepala daerah yang berpotensi menang karena mempunyai modal paling kuat sekaligus mempunyai jaringan terluas memobilisasi suara.

PDI-P sebagai partai pemenang pemilu yang mestinya menawarkan jalan ideologis untuk menyejahterakan rakyat Sleman, justru menyingkirkan ideology demi memenangi pemilu kepala daerah. Alasannya, kemenangan ini menjadi langkah strategis untuk memobilisasi suara pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2014. Dalam konteks pencalonan pilkada, PDI-P sebenarnya tidak pernah idealis, yakni sejak awal tahapan seleksi kandidat tidak dikawal idealisme partai. Terutama sekali, PDI-P mengingkari komitmen dengan konstituen partai. Salah satu buktinya adalah tiga orang ketua PAC yang menolak pasangan Sri Purnomo dan Yuni justru menerima reaksi pemecatan.

Namun, partai politik yang menawarkan kandidat untuk berkompetisi di pilkada tidak berbasiskan mekanisme platform partai. Elit politik di partai menggambarkan ideologi yang indah-indah. Namun praktiknya berbicara lain, apa yang diucapkan dan dipraktikkan tidak sejalan. Partai lebih mengutamakan kemenangan demi kekuasaan belaka. Untuk itu, roh partai membela rakyat telah menyimpang. Janji-janji dan program kerja yang muluk-muluk saat kampanye yang sebetulnya menunjukkan pasangan yang mendadak dipasangkan antara Sri Purnomo-Yuni tidak dikerangkai visi dan misi mereka. Apalagi meletakkan visi dan misi dalam pemahaman yang memadai tentang sistem kerja birokrasi, mekanisme anggaran dan realitas lainnya.

Kenyataan ini juga terjadi pada mekanisme kaderisasi. Mekanisme untuk mengisi pos-pos kaderisasi pun telah dinodai politik uang dalam mencari dukungan. Akibatnya, prosedur normatif AD/ART untuk mengisi jabatan di struktur partai sering disalahartikan demi mencari kekuasaan di lingkaran internal partai. Perilaku politik kader seperti ini ketika berhadapan dalam berkompetisi untuk memperebutkan jabatan publik menjadi pencundang—kalah sebelum bertanding. Norma-norma partai yang tertulis sering diabaikan.

Demikian juga dapat dibuktikan wajah partai di eksekutif. Ideologi adalah sebagai evaluasi kerja partai dalam mentransformasikan persoalan kemiskinan. Namun, terlihat dari waktu ke waktu PDI-P tidak mampu mengevaluasi diri bagaimana menuntaskan kemiskinan dalam masyarakat Sleman. Faktanya, sejak tahun 2005 angka kemiskinan di Sleman semakin bertambah. Pada titik ini, PDI-P memperlihatkan perilaku mencari posisi aman daripada menterjemahkan nilai-nilai ideologi Pancasila.

Dalam konteks kompetisi di Pilkada, partai politik berlomba-lomba merekrut kandidat yang populer dan berkantong tebal. Fenomena ini dilakukan hampir semua partai pemenang, apalagi partai yang kalah tak bisa keluar dari jalan pragmatisme sebagai upaya keras untuk menutupi kelangkaan finansial partai. Bila PDI-P keluar dari jalan pragmatisme maka konsekuensinya akan kalah. Jelas ini berlawanan dengan cita-cita PDI-P untuk merebut kekuasaan. Alasannya, kalau menuruti kerja partai yang ditopang visi ideologi adalah harus tertib, disiplin dan serius menterjemahkan nilai-nilai ideologi dalam segala aspek aktivitas partai.

Sebenarnya, masyarakat Sleman yang homogen telah memperjuangkan suatu sistem politik yang dibingkai demokrasi substansial sebagai jalan untuk membangun kesejahteraan bagi banyak orang. Karena itu, masyarakat memiliki *bargaining position* untuk memberikan jalan bagi orang atau partai untuk meraih kekuasaan. Pragmatisme masyarakat Sleman bisa dilihat dari tiga fenomena. *Pertama*, banyaknya gerakan *civil society* yang ternyata belum mampu mengikis pola pikir masyarakat yang masih kuat tergantung pada pola paternalistik. *Kedua*, perilaku politik *grass roots* yang memanfaatkan momentum pilkada untuk memeras kandidat. Realitas ini memperlihatkan bahwa perilaku politik *grass roots* tidak ingin kehilangan momentumnya karena janji-janji politik kandidat seperti pilkada atau

pemilu sebelumnya tidak membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat. *Ketiga*, perilaku elit politik yang melakukan pencitraan politik dengan moal besar.

Inilah politik berbiaya tinggi, yang dipicu dari dua faktor. Biaya tinggi yang pertama, disebabkan kultur masyarakat Sleman yang masih belum sepenuhnya modernis. Tingkat keaktifan masyarakat dalam politik yang belum begitu tinggi, menjadikan mereka perlu dimobilisasi dan diarahkan, baik oleh patron/tokoh masyarakat maupun oleh para kandidat. Dalam hal ini, orang atau kelompok tertentu bisa mengais untung dengan menjadi perantara antara kandidat dan massa. Dari sinilah muncul makelar, yang bertugas mobilisasi/kampanye pencitraan di kalangan *grass roots*. Pragmatisme masyarakat juga muncul, sebab masyarakat tidak terlalu peduli pada afiliasi politik ataupun ideologi yang diusung kandidat. Lagi pula, saat pilkada merupakan kesempatan ketika mereka diperhatikan oleh para elit. Adapun ketika para kandidat terpilih, masyarakat merasa diabaikan. Karena itu, para kandidat pun kebanjiran proposal, mulai dari tempat ibadah hingga infrastruktur.

Adapun biaya tinggi kedua, yakni konserannya kandidat pada upaya pencitraan, merupakan simbol dari pragmatisme kandidat dalam menghadapi konstituen. Politik yang berlangsung adalah masih dalam bentuk permukaan dan parsial. Hanya politik slogan, bukannya program riil. Iklan luar yang terpampang hanya mendidik masyarakat untuk mengenal fisik calon, bukan visi dan misinya.

Realitas masyarakat umumnya sangat pragmatis, yakni menghindari perdebatan kontradiksi ideologi yang mandul, dan memilih cara-cara praktis yang dapat dirasakan kenyamanan bersama. Ketika partai menawarkan kandidat yang dicalonkan untuk mengisi kepala daerah, sejauh kandidat itu dapat memberikan keamanan, sejauh itu juga dapat diterima. Kenyataan ini dapat dilihat dari terekrutnya Sri Purnomo yang berbasiskan Muhammadiyah, yang jarak ideologinya sangat berbeda dengan PDI-P. Dilema politik ini bagi PDI-P adalah kompromi ideologi adalah suatu tindakan politik yang serba boleh kerja sama. Jadi, pertimbangannya bukan atas dasar ideologi, tetapi murni kebutuhan untuk memenuhi kelangkaan finansial partai sehingga siapa yang bisa memenuhi janji akan memberikan uang saat ini atau untuk ke depan,

dialah yang terekrut.

Pragmatisme terjadi pula dalam seleksi di internal PDI-P. PDI-P lebih mengutamakan membentuk patron untuk ke depan daripada menjaga konstituen kader partai. Bukti ini dapat dilihat dari terekrutnya Yuni yang tidak berbasiskan suara akar rumput partai. Padahal, prinsipnya, pemimpin adalah suatu entitas yang tidak dapat terpisahkan dari masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan matinya proses demokrasi karena proses rekrutmen tidak memperlihatkan sebagaimana mekanisme rekrutmen yang diharapkan yakni transparan dan akuntabel.

Rekrutmen politik adalah manifestasi dari bekerjanya sistem kaderisasi di partai. Dari sudut pandang ini, PDI-P adalah organisasi yang lemah, dalam arti sistem rekrutmen belum terlembaga. Sebaliknya, dapat dikatakan profesional bila sistem rekrutmen itu terencana dan tersistematis sehingga kader partai sudah dipersiapkan siapa yang mengisi untuk jabatan kepala daerah. Mungkin hal ini akan menjadi lain, karena kader merasa jaminan untuk jabatan tersebut. Pragmatisme partai mewujud dalam bentuk ambil kader asal mampu. Mereka tidak pernah mengkaderkan orang, dan tidak pernah ada rute-rute untuk yang memastikan jabatan tertentu. Inilah bukti merosotnya peran anggota dalam menentukan garis perjuangan partai.

Karena itu, dapat ditegaskan bahwa partai pemenang pun tidak bisa keluar dari sikap pragmatis dalam rekrutmen, apalagi partai yang kalah. Adapun watak masyarakat yang serba permisif dalam kandidasi, mengakibatkan siapapun kandidat yang ditawarkan partai tidaklah menjadi persoalan. Disinilah pragmatisme masyarakat menjustifikasi pragmatisme yang berlangsung dalam partai. Jadi, pragmatisme masyarakat dan partai adalah suatu lingkaran yang menjerat proses rekrutmen politik.

Penelitian ini mendudukan proses rekrutmen politik dalam analisa pragmatisme masyarakat dan partai. Posisi penelitian ini berupaya mengupas sejauhmana pragmatisme mempengaruhi proses rekrutmen politik pada khususnya, dan perilaku partai politik pada umumnya.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa studi ini menegaskan argumen Sutoro Eko tentang krisis demokrasi lokal. *Pertama*, partai politik di Indonesia lebih kental dengan personalitas para elit ketimbang sebagai organisasi yang mengakar ke bawah. Akibatnya, ketergantungan organisasi

partai pada figur pemimpin puncaknya ketimbang kinerja secara keseluruhan, sebagai instrumen untuk melegitimasi kekuasaan. *Kedua*, proses rekrutmen tidak berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Kandidat sama sekali tidak mempunyai kepekaan terhadap nasib konstituennya karena dia merasa hanya “mewakili” kelompoknya bukan konstituen yang sebenarnya. Dampaknya, upaya membangun akuntabilitas dan responsivitas menjadi sangat lemah. *Ketiga*, dalam proses rekrutmen tidak ada relasi antara partai politik dan masyarakat sipil. Pada saat bersamaan, berbagai organisasi masyarakat berperan sebatas *underbow*, mesin politik yang bertugas sekadar memobilisasi massa, bukan sebagai basis perjuangan politik partai. *Keempat*, dalam proses rekrutmen, partai politik sering menerapkan pendekatan “asal comot” terhadap kandidat yang dipandang sebagai “mesin politik” atau “mesin uang”. Hal ini cenderung mengabaikan aspek legitimasi, komitmen, kapasitas, dan misi perjuangan. Misalnya, para mantan tentara dan pejabat direkrut bukan karena visi dan misinya, melainkan karena sisa-sisa jaringan kekuasaan yang dimilikinya.

Namun demikian, studi ini memunculkan sesuatu yang baru dibanding uraian Sutoro Eko (2004) maupun penelitian lainnya. Hal ini karena studi ini menggunakan teori pragmatisme politik, bahwa pragmatisme politik dalam perekrutan kandidat pilkada adalah sangat dipengaruhi pragmatisme masyarakat. Adapun kelebihan studi ini, adalah sifatnya sebagai studi kasus. Dalam studi kasus ini, peneliti mampu membongkar rahasia internal PDI-P Sleman secara transparan. Hal ini didasarkan para elite yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yang mampu memberikan jawaban yang terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, A. Gabriel dan Sidney Verba (1990). *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Penterjemah, Sahat Simamora. Bumi Aksara, Jakarta
- Ambardi, Dodi. 2010. “Perilaku Parpol dan Kepentingan Publik” dalam *Kompas*, 29 Juni 2010
- Anggara, Fendi (2008). *Meretas Jalan ke Singgasana*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM. Yogyakarta

- Aspinall, Edward dan Greg Fealy, eds (2003). *Local Power and Politics in Indonesia*. Singapore and Caberra: Institute of Southeast Asian Studies dan Research School of Pacific and Asian Studies, Australia National University
- Choi, Nankyung <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/463ae6272.pdf>. Diunduh 29 Maret 2010
- Eko, Sutoro (2004). *Krisis Demokrasi Lokal* dalam Mas'ood dan Budiman (Eds), *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu*. Percik dan Pustaka Pelajar
- Erawan, I. Ketut Putra (2005). Modul Kuliah *Legislasi, Partai dan Pemilu, Organisasi dan Manajemen Kepartaian*. Bab I.
- Evans, Kevin Raymond. 2007. *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. PT. Arise Consultancies, Jakarta
- Gideon, Rahat dan Reuven Y. Hazan (2006). *Candidate Selection: Methods and Consequences*. Hand Book Party Politics, edited by Ricahrd S Katz dan William Crotty. Sage Publishing. London
- Hamid, Farhan (2008). *Partai Politik Lokal di Aceh, Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*. Kemitraan. Jakarta
- Imawan, Riswanda (2004). *Partai Politik di Indonesia, Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar UGM. Jakarta Press. "Golkar yang menang di banyak daerah dalam pemilu legislatif, mengalami kekalahan telak dalam Pilkada selama 2009 sampai 2010". <http://www.jakartapress.co.id/berita/0307/01/jp09.html>. Diakses, 22 Januari 2011
- James, William (1907). "Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking in Encyclopedia, 2005
- Lampiran SK Nomor: 006/TAP/DPC/XI/2009 Tentang Tim Verifikasi PDI-P Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman. Tanggal, 23 November 2009
- Lay, Cornelis. 2008. "Involusi Politik". *JIP Fisipol UGM-S2 PLOP UGM*, Yogyakarta.
- Marijan, kacun. 2010, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- . 2006. *Demokratisasi di Daerah*. Pusdeham. Surabaya
- Mas'ood dan Budiman (ed) . 2006. *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu*

2004. Percik dan Pustaka Pelajar
- Norris, Phillips (2006). *Recruitment*. dalam Handbook edited by R. S. Katz dan W. Crotty. Sage Publication. London
- Pamungkas, Sigit (2010). *Pemilu, Perilaku Pemilih dan Kepartaian*. Institute for Democracy and Welfarism. Yogyakarta
- _____. 2010. *Krisis Demokrasi Elektoral, Peta Politik di Era Pancaroba*. Institute for Democracy and Welfarism. Yogyakarta
- _____. 2010. *Pembaharuan Pilkada*, makalah disampaikan dalam Diskusi Tentang RUU Pilkada—Hak Inisiatif DPD RI, yang diselenggarakan oleh The Cholid Mahmud Center Yogyakarta, 30 Desember.
- _____. 2009. *Perihal Pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan. UGM.
- _____. 2009. *Seleksi Kandidat dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009*. Tesis Tidak Dipublikasikan. PLOD: UGM
- _____. 2009. *Tiga Wajah Uang dalam Pilkada*. Makalah disampaikan dalam diskusi yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Etis Yogyakarta, 24 Juli.
- _____, 2006. “Dilema Kekuasaan Birokrasi” dalam *Jurnal Politika* Vol. 4. No. 2
- Penning, Paul dan Reuven Y. Hazan. 2000. “Democratizing Candidate Selection; Causes and Consequences”, Vol. 7. No. 3 dalam <http://www.hazan-research.net/pdf>. Diunduh tanggal 10 Oktober 2010
- Prihatmoko, Joko J. 2006. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Purwoko, Bambang. 2010. “Pilkada Kurang Greget” dalam *Kedaulatan Rakyat*, 12 November
- Ranney, Austin. 2005. “Recruitment Candidacy” dalam *Encyclopedia of Democracy*, Seymour Martin Lipset. *Congressional Quarterly*. Inc. Washington, D.C. Vol 1. Diunduh tanggal, 10 Oktober 2010
- Sahdan et al. 2009. *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*. IPD & Konrad Adenauer Stiftung. Yogyakarta
- Sinar Harapan. 2011. “Cukup Fenomenal, Kemenangan PKS dalam Pilkada Jawa Barat” dalam <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0505/08/sh08.html>. Diakses tanggal 22 Januari

- Sujatmiko. Surat Pemecatan Saya atau Pembebastugasan atau Pemberhentian sebagai Ketua PAC PDI-P Tempel
- Tawakkal, George Towar Ikbal (2009). *Peran Partai Politik dalam Mobilisasi Pemilih*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro. Semarang
- Triyono, Lambang. 2010. "Politik Tersandera". *Kedaulatan Rakyat*, 17 Mei 2010
- Widjaja, Albert. 1988. *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. LP3ES. Jakarta
- William James. 2011. "Classical Pragmatism", *Classical Sociology: Religion and Emotion' in Pragmatism and European Social Theory*, edited by Patrick Baert and Bryan Turner. Oxford: The Bardwell Press, 2007 dalam <http://www.wiliamjames-research.net/pdf>. Diunduh tanggal 17 Januari.